



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2013

**Dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan
Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2014
Mahkamah Konstitusi**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

MK mempunyai empat kewenangan berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu: 1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban MK tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden dengan masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan

bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi : Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi : - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2012 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2012 Kepaniteraan Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2012 pasal 11 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- b. Perencanaan, analisis, dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan, dan ekspedisi, serta barang milik negara;
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
- f. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

IV. REALISASI PNBP TA 2011 HINGGA TA 2012

A. Target dan Realisasi PNBP TA 2011

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.571.617.000,-**. Realisasi PNBP pada TA 2011 adalah sebesar **Rp.793.329.239,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2011

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	10.000.000,-	0,-	0
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	88.128.000,-	48.396.766,-	54,91
3	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	473.489.000,-	329.882.282,-	69,67
4	Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	152.849.044,-	0
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	423911	0,-	893.220,-	0
6	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	423922	0,-	64.510.192,-	0
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	423999	0,-	196.797.735,-	0
Jumlah			571.617.000,-	793.329.239,-	138,78

B. Target dan Realisasi PNBP TA 2012

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.567.887.256,-**. Realisasi PNBP pada TA 2012 adalah sebesar **Rp.858.507.396,-**. Kenaikan realisasi PNBP pada TA 2012 dibandingkan dengan TA 2011 disebabkan adanya peningkatan pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang serta pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2012

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	557.887.256,-	641.443.808,-	115
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	0,-	0
3	Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara	423922	0,-	14.877.848,-	0
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat tahun yang lalu	423911	0,-	2.262.942,-	0
5	Penerimaan Kembali Belanja lainnya tahun yang lalu	423913	0,-	69.642.882,-	0
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	130.279.916,-	0
Jumlah			567.887.256,-	858.507.396,-	151

V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP TA 2013

Target penerimaan PNBP TA 2013 mengalami kenaikan dari target PNBP TA 2012, yaitu dari sebesar Rp.567.887.256,- menjadi sebesar Rp. 762.199.256,- atau adanya kenaikan sebesar 34,22%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya sewa pada sewa gedung serbaguna dan ruang Pusdiklat. Tarif sewa ruang Pusdiklat disesuaikan dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-137/MK.6/2010.

VI. TARGET PNBP TA 2013

Pada TA 2013 MK menargetkan PNBP sebesar Rp. 762.199.256,-. Rincian Penerimaan tersebut terdapat dalam **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan**

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI dengan rincian antara lain:

- a. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa sewa lantai basement (kafetaria, kedai kopi, dan kantor koperasi) seluas 114,60 m² sebesar 54.528.000,- dengan tarif Rp. 475.812,-/m², lantai dasar (toko serba ada, toko buku dan cinderamata, dan kantor bank BRI) seluas 60,18 m² sebesar Rp. 94.507.256,- dengan tarif Rp. 1.570.409,- /m².
- b. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa penyewaan gedung serbaguna dan perlengkapannya serta gedung pusdiklat sebanyak 2 (dua) ruangan sebesar Rp. 485.600.000,- seluas 1.146 m² dengan tarif penyewaan Rp. 423.735,- /m².
- c. Pendapatan sewa rumah dinas berupa sewa rumah negara terdiri dari:
 - 8 unit Rumah Eselon II dengan sewa Rp. 286.000,-/bulan Rp. 27.456.000,-
 - 15 unit Rumah Eselon III dengan sewa Rp. 187.000,-/bulan Rp. 33.660.000,-
 - 32 buah Rumah Eselon IV dgn sewa Rp.147.000,-/bulan Rp. 56.448.000,-
Rp.117.564.000,-
- d. Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,-.

Rincian Pendapatan selama TA 2013 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2013

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (RP)	Jumlah (RP)
1	423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan			634.635.256,-
		• Sewa lantai basement	114,60 m ²	475.812,-	54.528.000,-
		• Sewa lantai dasar	60,18 m ²	1.570.409,-	94.507.256,-
		• Sewa gedung serbaguna dan Pusdiklat	1.146 m ²	423.735,-	485.600.000,-
2	423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri			117.564.000,-
		• Rumah Eselon II	8 unit x 12 bl	286.000,-	27.456.000,-
		• Rumah Eselon III	15 unit x 12 bl	187.000,-	33.660.000,-
		• Rumah Eselon IV	32 unit x 12 bl	147.000,-	56.448.000,-
3	423129	Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebih/rusak /dihapuskan	12 bl		10.000.000,-
Jumlah					762.199.256,-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2013
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ESELON I : 01 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 653910 MAHKAMAH KONSTITUSI RI
JENIS SATKER : KP KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.B02
TANGGAL : 13/09/13
HAL : 1
PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			BULAN INI 4	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	TRANSAKSI KAS						
42	Penerimaan Dalam Negeri						
423	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
4231	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan						
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	52,900,000	0	52,900,000	0.00
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	52,900,000	0	52,900,000	0.00
42314	Jumlah Penerimaan 42312						
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN		10,139,171	715,615,658	0	715,615,658	0.00
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,139,171	715,615,658	0	715,615,658	0.00
	Jumlah Penerimaan 42314						
4239	Jumlah Penerimaan 4231	0	10,139,171	768,515,658	0	768,515,658	0.00
42391	Pendapatan Lain-lain						
423911	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	12,885,148	0	12,885,148	0.00
423913	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	0	197,939,277	0	197,939,277	0.00
	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	0	210,824,425	0	210,824,425	0.00
	Jumlah Penerimaan 42391						
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang						
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0	1,240,000	21,010,148	0	21,010,148	0.00
	Jumlah Penerimaan 42392	0	1,240,000	21,010,148	0	21,010,148	0.00
	Jumlah Penerimaan 4239	0	1,240,000	231,834,573	0	231,834,573	0.00
	Jumlah Penerimaan 423	0	11,379,171	1,000,350,231	0	1,000,350,231	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	0	11,379,171	1,000,350,231	0	1,000,350,231	0.00
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	11,379,171	1,000,350,231	0	1,000,350,231	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	11,379,171	1,000,350,231	0	1,000,350,231	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2013
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 077
ESELON I : 01
WILAYAH/PROPINSI : 0199
SATUAN KERJA : 653910
JENIS SATKER : KP

MAHKAMAH KONSTITUSI RI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
INSTANSI PUSAT
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
KANTOR PUSAT

KD. LAPORAN : LRPS.B02
TANGGAL : 13/09/13
HAL : 2
PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN					% REAL. PEND
			BULAN INI 4	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS	0	11,379,171	1,000,350,231	0	1,000,350,231	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS)	0	11,379,171	1,000,350,231	0	1,000,350,231	0.00	

VII. ALASAN NAIK/TURUNNYA TARGET PNBP TA 2013 TERHADAP TA 2012

Pada TA 2013 target PNBP Mahkamah Konstitusi RI mengalami kenaikan dibandingkan dengan target PNBP 2012, hal tersebut disebabkan meningkatnya biaya sewa gedung serbaguna, pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri dan ruang Pusdiklat Mahkamah Konstitusi.

VIII. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2011 s.d. TA 2012

Sejak TA 2011 sampai dengan TA 2012 tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari PNBP.

IX. BESARAN PAGU YANG DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI DARI DANA PNBP TA 2013

Dalam TA 2013 tidak terdapat pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari PNBP.

X. PERKIRAAN TARGET PNBP TA. 2014 SAMPAI DENGAN TA. 2017

Penerimaan PNBP TA 2014 Mahkamah Konstitusi RI diprediksi sebesar Rp.762.199.256,- kemudian untuk PNBP TA 2015 diperkirakan mencapai Rp.861.285.159,- dan target PNBP TA 2016 diperkirakan sama dengan TA 2015 dan TA 2017. Adapun rincian target PNBP 2014, 2015, 2016, dan 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Target PNBP TA 2014, 2015, 2016, dan 2017

No	Uraian	Kode MAP	Target PNBP (RP)			
			2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan	423142	634.635.256,-	733.721.159,-	733.721.159,-	733.721.159,-
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri	423141	117.564.000,-	117.564.000,-	117.564.000,-	117.564.000,-
3	Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebih/rusak /dihapuskan	423129	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
Jumlah			762.199.256,-	861.285.159,-	861.285.159,-	861.285.159,-

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2014.

Jakarta, 30 Januari 2013
SEKRETARIS JENDERAL,

JANEDJRI M. GAFFAR
NIP. 19631025 198802 1 001